

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM KONTEKSTUAL DAN TANTANGAN KEPEMIMPINAN DI MASYARAKAT PESISIR SELAT MALAKA

Puji Widianti ✉, Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai
Nur Fitri Afifah, Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai
Rinton Gusrican, Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai
Abdi Mubarak, Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai
Hambali, Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai
Deni Suryanto, Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

✉ puji.widianti@gmail.com

Vol. 2, No. 3 (2026): November-Januari

Abstrak. Artikel ini membahas kebijakan pendidikan Islam kontekstual dan tantangan kepemimpinan pendidikan Islam dalam masyarakat pesisir Selat Malaka. Pendidikan Islam di wilayah pesisir dihadapkan pada dinamika sosial yang khas, seperti fluktuasi ekonomi maritim, mobilitas sosial yang tinggi, serta karakter budaya masyarakat yang terbuka dan egaliter. Kondisi tersebut menuntut kebijakan pendidikan Islam yang tidak hanya bersifat normatif dan seragam, tetapi mampu beradaptasi dengan konteks sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dan analisis dokumen kebijakan, dengan menelaah berbagai literatur nasional dan internasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa permasalahan utama pendidikan Islam di masyarakat pesisir bukan terletak pada ketiadaan kebijakan, melainkan pada lemahnya integrasi antara kebijakan pendidikan Islam dan kepemimpinan pendidikan Islam di tingkat kelembagaan. Kepemimpinan pendidikan Islam memiliki peran strategis sebagai mediator yang menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik pendidikan yang kontekstual. Artikel ini menawarkan model integratif yang menekankan kontekstualisasi kebijakan, kepemimpinan kultural-adaptif, dan orientasi keberlanjutan sebagai prasyarat terwujudnya pendidikan Islam yang relevan, memiliki legitimasi sosial, dan berkelanjutan di masyarakat pesisir.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan Islam, Kepemimpinan Pendidikan Islam, Komunitas Pesisir, Pendidikan Islam Kontekstual

Abstract. This article examines contextual Islamic education policy and leadership challenges within coastal communities of the Malacca Strait. Islamic education in coastal areas faces distinctive social dynamics, including fluctuating maritime-based economies, high social mobility, and open, egalitarian cultural characteristics. These conditions require Islamic education policies that move beyond normative and standardized approaches toward greater contextual adaptability. This study employs a qualitative approach through library research and policy document analysis, drawing on relevant national and international literature. The findings indicate that the central challenge of Islamic education in coastal communities lies not in the absence of policy, but in the weak integration between Islamic education policy and educational leadership at the institutional level. Islamic educational leadership plays a strategic role as a mediator in translating policy into context-sensitive educational practices. This article proposes an integrative model emphasizing policy contextualization, cultural-adaptive leadership, and sustainability orientation as key elements for achieving socially relevant, culturally legitimate, and sustainable Islamic education in coastal communities.

Keywords. Islamic Education Policy, Islamic Educational Leadership, Coastal Communities, Contextual Islamic Education

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir Selat Malaka, khususnya Kota Dumai di Provinsi Riau, memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan keagamaan yang khas sebagai kawasan maritim strategis sekaligus ruang pertemuan berbagai budaya. Kondisi tersebut membentuk dinamika masyarakat yang berbeda dengan wilayah pedalaman, baik dari segi mobilitas sosial, pola mata pencaharian, maupun praktik keberagamaan. Dalam konteks ini, pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial pesisir yang menuntut fleksibilitas kebijakan serta kepemimpinan pendidikan yang adaptif dan kontekstual (Tilaar, 2012).

Kebijakan pendidikan Islam secara nasional pada dasarnya dirancang untuk menjamin keseragaman standar mutu dan arah pengembangan pendidikan. Namun, dalam praktiknya, kebijakan yang bersifat sentralistik sering kali menghadapi tantangan ketika diimplementasikan pada masyarakat dengan karakter sosial yang unik, seperti masyarakat pesisir Dumai. Ketergantungan pada sektor maritim, fluktuasi ekonomi keluarga, serta intensitas interaksi lintas budaya memengaruhi keberlangsungan lembaga pendidikan Islam, baik dari sisi partisipasi peserta didik maupun dukungan masyarakat (Azra, 2017).

Dalam konteks Dumai, kebijakan pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai-nilai keislaman yang moderat dan kontekstual. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pendidikan Islam di wilayah pesisir menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan tuntutan kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal masyarakat (Suryanto, 2023). Ketidaksesuaian ini berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan apabila tidak diiringi dengan kepemimpinan pendidikan yang memahami realitas sosial setempat.

Kepemimpinan pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam menjembatani kebijakan dan praktik pendidikan di tingkat lokal. Pemimpin lembaga pendidikan Islam dituntut tidak hanya mampu menjalankan kebijakan formal, tetapi juga memiliki sensitivitas sosial dan kultural agar kebijakan tersebut dapat diterima dan dijalankan secara efektif oleh masyarakat pesisir. Kepemimpinan yang bersifat normatif dan birokratis cenderung kurang responsif terhadap dinamika masyarakat maritim yang cair dan dinamis (Bush, 2019). Oleh karena itu, kepemimpinan pendidikan Islam di wilayah pesisir memerlukan pendekatan kontekstual yang berbasis pada nilai, budaya, dan kebutuhan masyarakat lokal.

Sejumlah penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti kebijakan pendidikan Islam dari aspek normatif atau administratif, sementara kajian yang mengaitkan kebijakan pendidikan Islam dengan tantangan kepemimpinan dalam konteks masyarakat pesisir masih relatif terbatas, khususnya di wilayah Selat Malaka. Padahal, integrasi antara kebijakan yang kontekstual dan kepemimpinan yang adaptif merupakan kunci keberhasilan pendidikan Islam dalam menghadapi kompleksitas sosial masyarakat pesisir (Leithwood et al., 2020).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pendidikan Islam dikontekstualisasikan di masyarakat pesisir Selat Malaka serta mengidentifikasi tantangan kepemimpinan pendidikan Islam dalam implementasi kebijakan tersebut di Kota Dumai, Provinsi Riau. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian kebijakan dan kepemimpinan pendidikan Islam, serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan pendidikan Islam yang lebih responsif terhadap karakteristik masyarakat pesisir.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen kebijakan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada pengkajian konseptual dan analitis terhadap kebijakan pendidikan Islam serta tantangan kepemimpinan pendidikan melalui penelaahan sistematis atas sumber-sumber tertulis, bukan pada pengumpulan data lapangan. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti menelaah gagasan, kebijakan, dan praktik pendidikan Islam secara kritis dalam berbagai konteks sosial (Zed, 2014).

Sumber data penelitian sepenuhnya berasal dari data sekunder, yang meliputi dokumen kebijakan pendidikan Islam, peraturan perundang-undangan, laporan kelembagaan, serta artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan tema kebijakan pendidikan Islam, kepemimpinan pendidikan, dan pendidikan Islam kontekstual. Literatur dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi substansi, otoritas sumber, serta kontribusinya terhadap penguatan argumentasi akademik penelitian (Snyder, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur ilmiah secara sistematis dan analisis dokumen kebijakan. Dokumen kebijakan dianalisis untuk mengidentifikasi arah, prinsip, dan implikasi kebijakan pendidikan Islam, sedangkan literatur ilmiah digunakan untuk membangun pemahaman teoretis serta memetakan temuan-temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kepemimpinan pendidikan Islam dan konteks sosial masyarakat. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan sintesis konseptual yang komprehensif (Bowen, 2009).

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan, ditafsirkan, dan disintesis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan Islam kontekstual dan tantangan kepemimpinan. Analisis dilakukan

secara reflektif dan iteratif guna memastikan keterpaduan antara data, konsep, dan argumentasi yang dibangun dalam penelitian (Krippendorff, 2018).

Keabsahan data dijaga melalui konsistensi dan keterlacakan sumber, dengan memastikan bahwa seluruh data dan literatur yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Perbandingan antar sumber juga dilakukan untuk memperkuat validitas interpretasi dan menghindari bias analisis dalam kajian kebijakan pendidikan Islam (Patton, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan Islam Kontekstual dalam Dinamika Masyarakat Pesisir Selat Malaka

Kebijakan pendidikan Islam pada hakikatnya merupakan produk relasi antara negara, institusi pendidikan, dan masyarakat. Dalam konteks masyarakat pesisir Selat Malaka, kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial yang cair, pola ekonomi maritim yang fluktuatif, serta dinamika budaya yang terbuka. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam di wilayah pesisir perlu dibaca bukan hanya sebagai teks normatif, tetapi sebagai praktik sosial yang berhadapan langsung dengan realitas kehidupan masyarakat (Tilaar, 2012).

Secara struktural, kebijakan pendidikan Islam nasional cenderung disusun dengan asumsi kondisi sosial yang relatif stabil dan homogen. Asumsi ini problematis ketika diterapkan pada masyarakat pesisir yang kehidupannya sangat dipengaruhi oleh ritme alam dan ekonomi maritim. Ketergantungan pada sektor perikanan dan jasa kepelabuhanan menjadikan sebagian masyarakat pesisir memiliki tingkat ketidakpastian ekonomi yang tinggi, yang berdampak pada prioritas keluarga terhadap pendidikan. Dalam kondisi demikian, kebijakan pendidikan Islam yang bersifat seragam berpotensi kehilangan relevansi sosialnya jika tidak disertai ruang adaptasi kontekstual (Hasbullah, 2016).

Dari perspektif kebijakan publik, ketidaksesuaian antara desain kebijakan dan konteks sosial menunjukkan adanya jarak antara level perumusan kebijakan dan level implementasi. Pendidikan Islam di wilayah pesisir tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga strategi kebijakan yang mampu mengakomodasi realitas sosial masyarakat. Azra (2017) menekankan bahwa pendidikan Islam yang berkelanjutan adalah pendidikan yang tumbuh dari dialog antara nilai normatif Islam dan kebutuhan sosial umat. Tanpa dialog tersebut, kebijakan pendidikan Islam berisiko menjadi simbol administratif yang minim daya transformasi.

Selain faktor ekonomi, karakter budaya masyarakat pesisir yang terbuka terhadap pengaruh eksternal juga membentuk tantangan tersendiri bagi kebijakan pendidikan Islam. Interaksi lintas budaya yang intens dapat memperkaya praktik pendidikan, tetapi sekaligus menuntut kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan penguatan identitas keislaman. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan Islam dituntut tidak hanya mengatur aspek kurikulum formal, tetapi juga mengarahkan proses internalisasi nilai yang relevan dengan kehidupan sosial masyarakat pesisir (Muhaimin, 2015).

Kebijakan pendidikan Islam kontekstual juga tidak dapat dilepaskan dari dimensi ideologis dan kultural. Pendidikan Islam di wilayah pesisir berhadapan dengan realitas keberagaman yang bersifat praksis, di mana nilai-nilai agama sering kali dipraktikkan secara fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam perlu menghindari pendekatan yang terlalu legalistik dan normatif, serta lebih menekankan pada penguatan nilai, etos, dan karakter keislaman yang kontekstual. Suryanto (2023) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan Islam yang kontekstual harus mampu menjembatani antara doktrin normatif dan realitas sosial umat.

Lebih jauh, kebijakan pendidikan Islam di masyarakat pesisir juga merefleksikan relasi kuasa antara negara dan masyarakat. Ketika kebijakan disusun secara top-down tanpa mempertimbangkan suara dan kebutuhan masyarakat pesisir, maka kebijakan tersebut berpotensi mengalami resistensi pasif dalam implementasinya. Resistensi ini tidak selalu muncul dalam bentuk penolakan terbuka, tetapi dalam bentuk rendahnya partisipasi, lemahnya komitmen, dan minimnya keberlanjutan program pendidikan Islam. Tilaar (2012) menyebut kondisi ini sebagai kegagalan kebijakan dalam membaca konteks sosial pendidikan.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam kontekstual di masyarakat pesisir Selat Malaka harus dipahami sebagai kebijakan yang bersifat adaptif, dialogis, dan sensitif terhadap struktur sosial masyarakat. Kebijakan yang mampu merespons dinamika ekonomi, budaya, dan keberagaman masyarakat pesisir memiliki peluang lebih besar untuk berfungsi secara efektif. Namun, kebijakan yang kontekstual saja tidak cukup apabila tidak didukung oleh kepemimpinan pendidikan Islam yang mampu menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik kelembagaan yang sesuai dengan realitas masyarakat. Pada titik inilah kebijakan dan kepemimpinan pendidikan Islam bertemu sebagai dua elemen yang tidak terpisahkan, yang akan dianalisis lebih lanjut pada subpembahasan berikutnya.

Tantangan Kepemimpinan Pendidikan Islam dalam Konteks Masyarakat Pesisir Selat Malaka

Kepemimpinan pendidikan Islam dalam konteks masyarakat pesisir Selat Malaka tidak dapat dipahami hanya sebagai fungsi manajerial yang bertugas menjalankan kebijakan pendidikan. Kepemimpinan di wilayah ini berada pada posisi strategis sekaligus dilematis, karena harus berhadapan dengan kebijakan formal yang bersifat nasional dan realitas sosial masyarakat pesisir yang dinamis serta tidak selalu sejalan dengan asumsi kebijakan tersebut. Kondisi ini menempatkan pemimpin pendidikan Islam sebagai aktor kunci dalam proses penerjemahan kebijakan ke dalam praktik kelembagaan.

Secara struktural, pemimpin lembaga pendidikan Islam di masyarakat pesisir sering kali beroperasi dalam keterbatasan sumber daya, baik finansial, sumber daya manusia, maupun dukungan kelembagaan. Ketergantungan masyarakat pada sektor ekonomi maritim yang fluktuatif berdampak pada stabilitas pembiayaan pendidikan serta kontinuitas partisipasi peserta didik. Dalam situasi seperti ini, kepemimpinan pendidikan Islam tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian target administratif, tetapi dituntut untuk memiliki kemampuan adaptif dalam mengelola ketidakpastian sosial dan ekonomi masyarakat (Mulyasa, 2018).

Tantangan kepemimpinan juga muncul dari aspek kultural masyarakat pesisir yang cenderung egaliter dan terbuka. Pola relasi sosial yang cair menyebabkan otoritas kepemimpinan formal tidak selalu diterima secara otomatis oleh masyarakat. Pemimpin pendidikan Islam dituntut untuk membangun legitimasi bukan semata-mata melalui jabatan struktural, tetapi melalui kedekatan sosial, keteladanan moral, dan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat. Dalam konteks ini, kepemimpinan pendidikan Islam memiliki dimensi kultural yang kuat, di mana keberhasilan kepemimpinan sangat ditentukan oleh kemampuan membaca nilai-nilai lokal masyarakat (Usman, 2019).

Lebih jauh, kepemimpinan pendidikan Islam di wilayah pesisir juga menghadapi ketegangan antara tuntutan normatif agama dan realitas praksis masyarakat. Pendidikan Islam sering diharapkan menjadi penjaga nilai-nilai keislaman, namun pada saat yang sama harus tetap relevan dengan kebutuhan hidup masyarakat pesisir yang pragmatis. Ketegangan ini menuntut pemimpin pendidikan Islam untuk mengambil posisi strategis agar lembaga pendidikan tidak terjebak dalam formalisme keagamaan yang terlepas dari realitas sosial, sekaligus tidak kehilangan identitas keislamannya (Muhaimin, 2015).

Dari perspektif kebijakan, tantangan kepemimpinan pendidikan Islam juga berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam menafsirkan dan mengadaptasi kebijakan pendidikan Islam yang bersifat umum ke dalam konteks lokal. Kebijakan yang dirancang secara top-down sering kali memberikan ruang interpretasi yang terbatas, sehingga pemimpin pendidikan Islam berada dalam posisi dilematis antara kepatuhan terhadap regulasi dan kebutuhan kontekstual lembaga. Ketidakmampuan pemimpin dalam mengelola dilema ini berpotensi menghasilkan praktik kepemimpinan yang formalistik dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat pesisir (Hasbullah, 2016).

Selain itu, kepemimpinan pendidikan Islam di masyarakat pesisir juga dihadapkan pada tantangan keberlanjutan kelembagaan. Mobilitas sosial masyarakat, perubahan orientasi pendidikan keluarga, serta kompetisi dengan lembaga pendidikan lain menuntut pemimpin pendidikan Islam untuk memiliki visi jangka panjang. Kepemimpinan yang reaktif dan jangka pendek cenderung gagal membangun daya tahan kelembagaan pendidikan Islam dalam menghadapi perubahan sosial. Oleh karena itu, kepemimpinan pendidikan Islam di

wilayah pesisir harus mampu mengintegrasikan visi keislaman dengan strategi pengembangan lembaga yang realistis dan berkelanjutan (Mulyadi, 2020).

Dengan demikian, tantangan kepemimpinan pendidikan Islam di masyarakat pesisir Selat Malaka tidak hanya bersifat teknis-manajerial, tetapi juga struktural, kultural, dan ideologis. Kepemimpinan pendidikan Islam dituntut untuk berperan sebagai mediator antara kebijakan dan realitas sosial, antara nilai normatif Islam dan kebutuhan praktis masyarakat. Ketidakmampuan kepemimpinan dalam menjalankan peran ini berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan pendidikan Islam, sekaligus mengurangi relevansi lembaga pendidikan Islam di tengah dinamika masyarakat pesisir. Analisis ini menegaskan bahwa pembahasan kebijakan pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari persoalan kepemimpinan, karena keduanya saling terkait secara dialektis dalam praktik pendidikan.

Integrasi Kebijakan dan Kepemimpinan sebagai Model Pendidikan Islam Kontekstual Masyarakat Pesisir

Pembahasan mengenai kebijakan dan kepemimpinan pendidikan Islam di masyarakat pesisir Selat Malaka menunjukkan bahwa persoalan utama pendidikan Islam bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada ketidakterpaduan antara desain kebijakan dan praktik kepemimpinan di tingkat kelembagaan. Kebijakan pendidikan Islam yang bersifat normatif dan seragam sering kali gagal mencapai tujuan substantifnya ketika dihadapkan pada realitas sosial masyarakat pesisir yang dinamis. Kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan Islam sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang mampu mengontekstualisasikan kebijakan tersebut dalam praktik pendidikan sehari-hari.

Secara konseptual, hubungan antara kebijakan dan kepemimpinan pendidikan Islam bersifat dialektis. Kebijakan menyediakan kerangka normatif dan struktural, sementara kepemimpinan berfungsi sebagai agen penerjemah yang menentukan bagaimana kebijakan tersebut dimaknai dan dijalankan. Dalam konteks masyarakat pesisir, kepemimpinan pendidikan Islam tidak dapat diposisikan sebagai pelaksana pasif kebijakan, tetapi sebagai aktor strategis yang memiliki ruang interpretasi dan diskresi dalam merespons kondisi sosial. Ketika kepemimpinan tidak memiliki kapasitas reflektif dan kontekstual, kebijakan pendidikan Islam cenderung direduksi menjadi prosedur administratif yang minim daya transformatif (Tilaar, 2012).

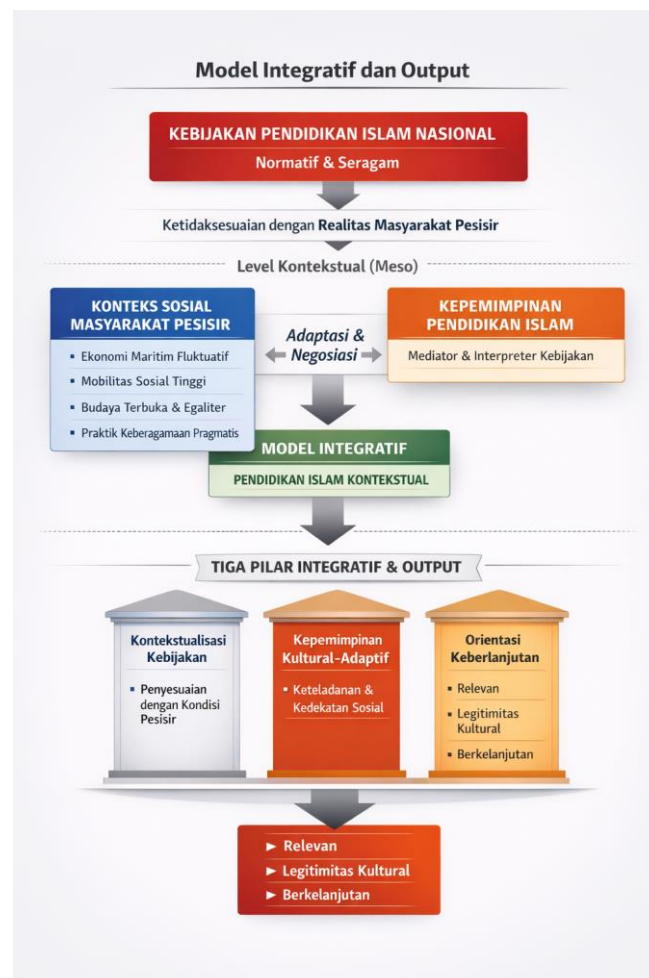
Temuan analitis dalam kajian ini menunjukkan bahwa model pendidikan Islam yang relevan bagi masyarakat pesisir adalah model yang mengintegrasikan kebijakan pendidikan Islam dengan kepemimpinan yang adaptif dan berorientasi sosial. Model ini menempatkan pemimpin pendidikan Islam sebagai mediator antara kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat, antara nilai normatif Islam dan realitas kehidupan pesisir. Dalam kerangka ini, kepemimpinan tidak hanya berfungsi menjaga kepatuhan terhadap kebijakan, tetapi juga mengelola negosiasi nilai dan kepentingan yang muncul dalam praktik pendidikan (Muhaimin, 2015).

Secara kritis, kegagalan banyak lembaga pendidikan Islam di wilayah pesisir mempertahankan relevansi sosialnya dapat ditelusuri pada dominasi pendekatan kepemimpinan formalistik yang terlalu menekankan kepatuhan administratif. Pendekatan ini cenderung mengabaikan dimensi sosial dan kultural masyarakat pesisir, sehingga kebijakan pendidikan Islam dijalankan secara simbolik tanpa internalisasi nilai. Dampaknya, pendidikan Islam kehilangan daya tarik sosial dan gagal membangun keterikatan emosional dengan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan Islam di wilayah pesisir bersifat struktural, bukan sekadar teknis (Hasbullah, 2016).

Model integratif kebijakan dan kepemimpinan yang ditawarkan dalam artikel ini menekankan tiga prinsip utama. Pertama, kontekstualisasi kebijakan, yakni kemampuan pemimpin pendidikan Islam dalam menafsirkan kebijakan sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat pesisir. Kedua, kepemimpinan kultural, yaitu kepemimpinan yang dibangun atas dasar legitimasi moral, keteladanan, dan kedekatan sosial dengan masyarakat. Ketiga, orientasi keberlanjutan, yaitu kemampuan kepemimpinan dalam membangun visi jangka panjang pendidikan Islam yang realistis dan relevan dengan dinamika masyarakat pesisir. Ketiga prinsip ini saling terkait dan menentukan efektivitas pendidikan Islam di wilayah pesisir (Mulyasa, 2018).

Implikasi dari model ini menunjukkan bahwa reformasi pendidikan Islam di masyarakat pesisir tidak cukup dilakukan melalui perubahan kebijakan semata. Tanpa penguatan kapasitas kepemimpinan pendidikan Islam, kebijakan yang progresif sekalipun berpotensi gagal di tingkat implementasi. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan Islam di wilayah pesisir memerlukan pendekatan kebijakan yang memberi ruang fleksibilitas kontekstual, sekaligus program penguatan kepemimpinan pendidikan Islam yang berbasis pada pemahaman sosial dan kultural masyarakat (Usman, 2019).

Gambar 1. Model Integratif Kebijakan dan Kepemimpinan Pendidikan Islam di Masyarakat Pesisir Selat Malaka



Gambar ini menggambarkan keterkaitan antara kebijakan pendidikan Islam nasional yang bersifat normatif dengan konteks sosial masyarakat pesisir melalui peran kepemimpinan pendidikan Islam sebagai mediator kebijakan. Model ini menegaskan bahwa kontekstualisasi kebijakan, kepemimpinan kultural-adaptif, dan orientasi keberlanjutan merupakan pilar utama dalam mewujudkan pendidikan Islam yang relevan, memiliki legitimasi kultural, dan berkelanjutan di masyarakat pesisir.

Dengan demikian, integrasi kebijakan dan kepemimpinan merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pendidikan Islam yang kontekstual dan berdaya guna di masyarakat pesisir Selat Malaka. Model ini tidak hanya memberikan kerangka konseptual baru dalam kajian pendidikan Islam, tetapi juga menawarkan arah kebijakan dan praktik kepemimpinan yang lebih responsif terhadap kompleksitas sosial masyarakat pesisir. Kontribusi ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik tentang kebijakan dan kepemimpinan pendidikan Islam, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pengambil kebijakan dan pengelola pendidikan Islam di wilayah pesisir.

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa kebijakan pendidikan Islam di masyarakat pesisir Selat Malaka tidak dapat dipahami dan dijalankan secara efektif apabila hanya bertumpu pada pendekatan normatif dan seragam. Realitas sosial masyarakat pesisir yang ditandai oleh dinamika ekonomi maritim, mobilitas sosial tinggi, serta karakter budaya yang terbuka menuntut kebijakan pendidikan Islam yang bersifat kontekstual dan adaptif. Tanpa kontekstualisasi, kebijakan pendidikan Islam berisiko kehilangan relevansi sosial dan berhenti pada tataran administratif.

Temuan analitis menunjukkan bahwa tantangan utama pendidikan Islam di masyarakat pesisir bukan terletak pada ketiadaan kebijakan, melainkan pada lemahnya integrasi antara kebijakan dan kepemimpinan pendidikan Islam. Kepemimpinan pendidikan Islam memiliki posisi strategis sebagai mediator yang menentukan bagaimana kebijakan dimaknai, dinegosiasikan, dan diimplementasikan dalam praktik kelembagaan. Kepemimpinan yang formalistik dan berorientasi administratif terbukti kurang mampu menjawab kompleksitas sosial masyarakat pesisir, sehingga melemahkan efektivitas kebijakan pendidikan Islam.

Artikel ini menawarkan model integratif yang menempatkan kebijakan pendidikan Islam dan kepemimpinan pendidikan Islam dalam hubungan yang saling menentukan. Model ini menekankan tiga pilar utama, yaitu kontekstualisasi kebijakan, kepemimpinan kultural-adaptif, dan orientasi keberlanjutan. Ketiga pilar tersebut menjadi prasyarat bagi terwujudnya pendidikan Islam yang tidak hanya patuh secara regulatif, tetapi juga relevan secara sosial, memiliki legitimasi kultural, dan berdaya tahan dalam menghadapi dinamika masyarakat pesisir.

Secara kebijakan, temuan ini mengimplikasikan perlunya perumusan kebijakan pendidikan Islam yang memberikan ruang fleksibilitas kontekstual bagi lembaga pendidikan di wilayah pesisir. Kebijakan yang terlalu sentralistik dan seragam perlu dilengkapi dengan mekanisme adaptasi lokal agar dapat menjawab kebutuhan sosial masyarakat secara lebih efektif.

Secara praktis, penguatan pendidikan Islam di masyarakat pesisir menuntut pengembangan kepemimpinan pendidikan Islam yang tidak hanya kompeten secara manajerial, tetapi juga memiliki sensitivitas sosial dan kultural. Program pengembangan kepemimpinan pendidikan Islam perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas reflektif, kemampuan negosiasi kebijakan, serta penguatan legitimasi sosial di tengah masyarakat.

Secara akademik, artikel ini berkontribusi pada pengembangan kajian kebijakan dan kepemimpinan pendidikan Islam dengan menawarkan model konseptual yang berbasis pada konteks masyarakat pesisir. Model ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya, baik dalam konteks wilayah pesisir lainnya maupun dalam kajian pendidikan Islam pada komunitas dengan karakter sosial yang spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2017). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Kencana.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Bush, T. (2019). School leadership and management: Theory, policy and practice. *Educational Management Administration & Leadership*, 47(1), 3–17. <https://doi.org/10.1177/1741143218792818>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

- Hasbullah. (2016). Kebijakan pendidikan Islam dalam konteks perubahan sosial. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 145–158.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muhaimin. (2015). *Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Mulyadi. (2020). Kepemimpinan pendidikan Islam dan keberlanjutan lembaga pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 1–14.
- Mulyasa, E. (2018). *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*. Bumi Aksara.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.ibusres.2019.07.039>
- Suryanto, D. (2023). Internalisasi nilai moderasi beragama pada kurikulum pendidikan agama Islam di perguruan tinggi Kota Dumai. *Jurnal Tafidu*, 1(4), 340–351.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Kebijakan pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik*. Rineka Cipta.
- Usman, H. (2019). *Manajemen: Teori, praktik, dan riset pendidikan*. Bumi Aksara.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.